

Sinergi dan Integrasi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir Laut dan Perlindungan Jenis di KBA Peleng Banggai



LAPORAN AKHIR PROGRAM
2019



1. INFORMASI PROGRAM

<u>Wilayah Pendanaan</u>	:	Desa dungkean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut Laut
KBA	:	Labobo Bangkurung
Strategic Direction(s)	:	Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
<u>Nama Proyek</u>	:	Sinergi dan Integrasi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir Laut dan Perlindungan Jenis di KBA Peleng Banggai
<u>Nomor Laporan</u>	:	01
<u>Periode waktu</u>	:	Januari 2019 – September 2019 (9 bulan)
<u>Disampaikan oleh</u>	:	Diatmoko Saputra
<u>Tanggal</u>	:	17 Agustus 2019

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: 8,845.23/USD

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : Rp. -

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Januari 2019 – September 2018

Lembaga pelaksana (mitra): SIKAP Institute

2. RINGKASAN

Kabupaten Banggai Laut mempunyai luas 22.042,56 km² yang terbagi atas daratan dan lautan. Luas daratannya sendiri adalah 3.214,45 km², sedangkan luas lautnya adalah 18.826,10 km². Pengelolaan dan pengawasan tentu saja memerlukan skema sumberdaya yang lebih besar. Sementara, praktek over fishing dan illegal fishing belum menemukan cara efektif dalam mengatasinya. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut masih rendah di tingkat masyarakat juga berkontribusi pada penanganan pengelolaan dan pelestarian.

Praktek *overfishing* dan destructive fishing di pulau Bangkurung dan Labobo mengakibatkan ancaman berbagai jenis terancam punah secara global di KBA Peleng Banggai meningkat. Dalam *Profile Ecosystem Wallacea*, disebutkan bahwa KBA Perairan Peleng Banggai adalah jalur pelintasan jenis laut seperti, Hiu Pondicherry (*Carcharhinus hemiodon*), Hiu Gergaji, (*Pristis pristis*) dan Duyung (*Dugong dugon*).

Di pesisir dengan garis pantai yang panjang merupakan menjadi lokasi terbaik bagi Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu hijau (*Chelonio mydas*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*) untuk melakukan pendaratan dan bertelur. Juga lengkap dengan kelompok terumbu karang yang menjadi habitat penting terumbu karang, teripang, dan ikan karang, termasuk di dalamnya ikan endemis capungan banggai (*Pterapogon kauderni*) yang berstatus Genting. Beberapa jenis laut yang terancam punah secara global masih saja diburu dan diperdagangkan. Alasan tindakan merusak ini dikarenakan nelayan tidak mengetahui bahwa jenis yang mereka tangkap adalah jenis yang dilindungi dan terancam punah secara global.

Oleh karena itu, SIKAP Institute menginisiasi upaya perlindungan pesisir dan laut di desa Bone bone. Inisiasi yang dilakukan melalui metode penyadartahuan dan identifikasi, perumusan, penetapan DPL secara partisipatif. Program yang di dukung oleh Burung Indonesia sejak Maret tahun 2017 sampai pada Maret 2018 telah mencapai kesepakatan perlindungan pesisir dan laut di desa Bone bone. Satu DPL telah terbentuk di desa beserta Kelompok Pengelola dan rencana kelola.

Proyek telah meningkatkan aksi masyarakat untuk mengurangi perburuan jenis jenis yang terancam punah secara global (*Global Threat Species*). Penetapan DPL terintegrasi dengan program desa melalui kesepakatan rencana pembangunan desa. Capaian di desa Bone Bone akhirnya memicu inisiatif pengelolaan DPL di desa lain yang ada di pulau Bangkurung. Sejumlah desa berminat mengadopsi pendekatan mengatasi semakin berkurangnya jumlah tangkapan ikan sekaligus melindungi jenis jenis yang terancam punah.

Inisiasi pengelolaan ekosistem laut pada capaian proyek sebelumnya telah melahirkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain masyarakat Pemdes, tokoh perempuan, camat Bangkurung, POKMASWAS Desa Taduno, POKMASWAS Lala, PPL DKP, POKDARWIS

Lala, Kades Dungkean, bersama OPD terkait Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Lingkungan Hidup, dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut. Komitmen ini dibuktikan dengan kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan inisiatif proyek yang ditandatangani oleh para pihak.

Komitmen yang dicapai sepatutnya ditindaklanjuti dengan rencana aksi bersama. Pada proyek pertama, uji coba patroli berhasil dilakukan dengan melibatkan para pihak pada 2 April 2018. Uji coba menghasilkan catatan rekomendasi dan evaluasi terkait efektifitas skema yang dilakukan pada proyek pertama. Untuk memperkuat dan menindaklanjuti capaian ini, pada proyek di masa akan datang akan menyoar pada pengawasan terhadap tindakan perburuan dan perdagangan jenis jenis dilindungi melalui pelebagaan tim patroli bersama melalui pembentukan institusi Wild Crime Unit (WCU) di KBA Perairan Peleng Banggai.

Di tahun 2018, replikasi dilakukan di desa Dungkean. Pendekatan dan metode yang sama telah membantu ketersediaan stok ikan tangkapan bagi nelayan Sero. DPL yang ditetapkan menjadi alat yang efektif dalam memantau praktek illegal fishing dan destructive fishing di desa Dungkean. Hasilnya, tangkapan dari Sero meningkat dan mendukung penghidupan nelayan desa.

2.1. Kondisi dan perkembangan program secara umum,

Perkembangan program secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan nelayan di dua desa yang bersumber dari tangkapan ikan di sekitar desa yang makin meningkat. Peningkatan pendapatan ini berdampak pada perubahan taraf hidup masyarakat dari usaha perikanan tangkap yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem pesisir dan terjaganya keragamanhayati seperti terumbu karang, lamun dan hutan mangrove.

Terjaganya keragamanhayati pesisir laut di desa Bone Bone dan Dungkean dilakukan dengan pendekatan dan skema Daerah Perlindungan Laut yang mendorong munculnya aksi aksi konservasi masyarakat untuk melindungi jenis jenis penting dan ekosistemnya. Dengan begitu, tindakan destructive fishing dan illegal fishing dapat dikendalikan langsung oleh nelayan bersama masyarakat setempat.

Dengan pendekatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) juga telah menciptakan ruang komunikasi dan kesepakatan kerja sama para pihak dalam penegakan hukum dan perlindungan keanekaragaman hayati di KBA Peling Banggai. DPL telah terbukti efektif dan efisien dalam mengurangi tindakan destructive dan illegal fishing, terutama yang kerap terjadi di pesisir desa. Keterbatasan pengawasan dari pihak terkait dapat dilakukan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

2.2. *Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan*

Proyek ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan upaya yang dapat mendukung inisiatif perlindungan keragamanhayati di wilayah pesisir laut desa. Capaian di tingkat desa juga berhasil disinergikan dengan kebijakan dan program di level Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam mengurangi ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan laut di tingkat tapak. Capaian capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Meluasnya area perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir laut melalui replikasi penyadartahuan dan penetapan DPLdi Desa Dungkean.**

Proyek dapat membekali pemahaman kepada masyarakat di dua desa tentang pentingnya menjaga kelestarian keanekaragamanhayati dan keseimbangan ekosistem pesisir. Pemahaman di desa telah mendorong lahirnya kesepakatan dan dukungan dari masyarakat Bone-Bone untuk menyusun dokumen dan peta zonasi daerah perlindungan laut (zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan) melalui musyawarah desa.

Bentuk kesadaran yang terbangun mendorong kelancaran kelompok pengelola DPL berbasis masyarakat di desa Bone Bone. Melalui proses musyawarah di tingkat desa DPL dan skema pengelolaannya disetujui secara mufakat dan diatur secara formal dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bone-Bone nomor 140/05/DS-BB/2018. SK Pemdes sekaligus menjadi dasar kelompok Pengelola DPL untuk menjalankan program dan rencana kerja yang ada.

Keberhasilan pembentukan DPL dan kelompok pengelolanya, selanjutnya direplikasi ke desa lain. Dalam proyek 2018, replikasi dilakukan di desa Dungkean. Desa tetangga Bone Bone. Pembelajaran yang diperoleh di desa Bonen Bone menjadi kunci sukses replikasi di desa Dungkean. Secara tehnik, metode dioperasionalkan sama, hanya pendekatan sedikit lebih berbeda di Dungkean, terutama *entry point* dalam pembentukan DPL yang lebih mengedepankan struktur dan mekanisme kelompok nelayan Sero yang ada di Dungkean.

Secara tradisional, kelompok Sero telah mengembangkan pola tangkap ikan di pesisir dengan menggunakan pengetahuan lokal yang ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan arus laut yang digunakan banyak jenis ikan dikumpul dalam satu perangkap jaring. Stok ikan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem pesisir setempat. Berdasarkan hasil kajian ekologi dan ekonomi, ditemukan masalah utama kelangsungan Sero di desa Dungkean, penggunaan bom dan potasium yang merusak terumbu karang berdampak pada jumlah tangkapan yang makin menurun lima tahun terakhir.

Oleh karena itu, kelompok nelayan Sero bersepakat untuk menerapkan skema perlindungan pesisir dan laut di sekitar desa. Metode yang dipilih melalui penetapan DPL dan secara kelembagaan, tiga kelompok Sero yang ada di desa bersepakat untuk meleburdiri dalam

Kelompok Pengelola DPL desa Dungkean dengan rencana kelolanya. Oleh Pemdes, kelompok pengelola DPL disahkan melalui Keputusan Kepala Desa Dungkean nomor 474/10/DS-DGKN/2019 tentang penetapan kelompok.

- **Peningkatan kapasitas pengurus DPL dan rencana kelola DPL terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Desa dan RZWP3K.**

Sepanjang program berjalan di dua desa di KBA perairan Peleng Banggai, upaya peningkatan kapasitas kelompok pengelola DPL secara terstruktur dikuatkan kapasitasnya. Rencana kelola DPL yang telah tersusun dan disepakati serta mendapat persetujuan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat disinergikan dengan rencana pembangunan desa. Mekanisme sinergi tertuang dalam RKPdes dan Perdes yang memperkuat rencana program kelompok pengelola DPL.

Penguatan kelembagaan kelompok DPL di dua desa, juga dikuatkan manajemen pengelolaannya melalui fasilitasi penyepakatan AD/ART. Dengan adanya AD/ART dua kelompok dapat merumuskan visi, misi dan program kerja mereka, sekaligus mengatur tata kelola kelompok agar dapat bekerja dengan baik dan berkesinambungan. Disamping itu, rencana kelola dirumuskan bersama agar dapat bersinergi dengan arah pencaanangan Kawasan Konservasi Perairan yang menjadi turunan Perda RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan begitu, rencana kelola DPL di dua desa dapat berkontribusi pada kebijakan/ program konservasi pesisir yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Di level kabupaten, program berupaya mendapatkan dukungan dan sinergi dengan kebijakan di level kabupaten. Namun target ini tidak berjalan dengan baik karena situasi yang tidak mendukung. Hambatan yang dihadapi terutama dari *political will* Pemkab Banggai Laut yang menilai urusan konservasi ada di level Provinsi.

- **Terbangun sinergi parapihak dalam upaya perlindungan jenis laut dan ekosistemnya melalui kelembagaan yang kolaboratif dengan dibentuknya tim WCU.**

Pelebagaan dan penyepakatan skema pengawasan dan perlindungan jenis di KBA Perairan Peling Banggai melalui pembentukan tim Wild Crime Unit (WCU) yang terdiri dari unsur terkait tidak dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan di dalam pencapaian output program. Hal ini disebabkan berbagai pengalaman tentang keberhasilan penetapan DPL di dua desa belum sepenuhnya menjadi perhatian dilingkup SKPD/OPD Kabupaten Banggai Laut.

Kendala utama pembentuk tim WCU pada kebijakan Bupati Banggai Laut yang tidak merespon baik rencana pembentukan WCU. Situasi ini muncul karena mainstreaming kepada Bupati Banggai Laut tidak maksimal. Sementara pihak kunci lainnya, seperti Wakil

Bupati, Kepala Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan TNI/Polairud sangat antusias.

2.3. *Perubahan asumsi dan resiko, serta respon/tindakan lembaga*

Penetapan zonasi Daerah Perlindungan Laut di Bone Bone dan Dungkean telah berkontribusi dalam implementasi RRWP3K Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian juga dengan penetapan Zona Pemanfaatan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari program kegiatan Dinas Pariwisata Banggai Laut sebagai area pengembangan wisata diving. Di level desa, RPJMDes telah memuat beberapa rencana kelola yang disepakati oleh Pengurus DPL agar saling sinergi dalam pembangunan desa dan pemastian sumber pendanaan dari DD/ADD.

2.4. *Kaitan antara capaian saat ini dengan (kontribusi terhadap) tujuan akhir (proyek)*

Tujuan akhir dari proyek ini untuk mendukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui replikasi DPL dan penegakan perlindungan jenis pada KBA Peling Banggai yang terintegrasi pada RZWP3K provinsi Sulawesi Tengah. dengan capaian dengan indikator sebagai berikut:

- 2.4.1. 60% masyarakat di 2 desa locus memahami dan mengenali jenis dan cara perlindungan keaneka ragaman hayati serta mampu melakukan monitoring terhadap area zona perlindungan laut serta mampu mengidentifikasi efektifitas kawasan perlindungan laut secara mandiri dan berkelanjutan.

Capaian indikator di desa dalam pengenalan jenis dan cara perlindungan keragamanhayati dilakukan melalui kegiatan kampanye dan penyadartahuan. Alat yang digunakan diantaranya; leafleat, pemutaran film dan diskusi kampung. Dasar utama pengembangan isu dan pilihan metode kampanye didahului dengan melakukan survey KAP di dua desa. Hasil survey KAP menjadi rujukan dalam mengelola isu dan pesan pesan penyadartahuan dan kampanye.

- 2.4.2. Meningkatnya 40% pengelolaan dan perlindungan area pesisir laut di 2 desa untuk mendukung konservasi keanekaragaman hati di KBA Peleng Banggai.

Capaian indikator pengelolaan dan perlindungan di dua desa dilakukan dengan memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat untuk melakukan identifikasi jenis mangrove, lamun dan terumbu karang. Setelah itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan survey di desanya. Aspek ekonomi dan sosial, juga dikaji melalui pengumpulan data dengan metode WSS dan FGD. Pelatihan partisipatif juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merumuskan dan

menetapkan zonasi yang disepakati dalam skema Daerah Perlindungan Laut Desa (DPL).

- 2.4.3. Species terancam punah seperti jenis paus, Dugon dugon, penyu sisik *Eretmochelys imbricata*, kardinal banggai *Pterapogon* dan beberapa jenis terumbu karang, teripang, dan ikan laut mengalami peningkatan minimal 30% dari tindakan perburuan dan perdagangan.

Indikator capaian ini diperoleh dari ditetapkannya Daerah Perlindungan Laut (DPL) di dua desa. Dengan adanya kesepakatan rencana kelola dan pengurus DPL, upaya perlindungan jenis menampakkan inisiatif. Sejumlah praktek penangkapan penyu diatasi oleh masyarakat dan penggunaan bom/potasium dapat dikontrol. Terutama yang kerap terjadi di area yang telah di zonasi.

3. CAPAIAN

- 3.4. **Objective** : Mendukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui replikasi DPL dan penegakan perlindungan jenis pada KBA Peling Banggai yang terintegrasi pada RZWP3K provinsi sulawesi tengah

3.4.1. Meluasnya area perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir laut melalui replikasi penyadartahuan dan penetapan DPL di Desa Dungkean

3.4.1.1. Diseminasi keberhasilan program fase pertama kepada parapihak di Kabupaten Banggai Laut,

Kegiatan ini telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator organisasi perangkat daerah menerima informasi dan capaian program pada fase pertama di desa bone bone. Peserta berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari (laki-laki 14 orang) diantaranya kepala dinas



kesbangpol banggai laut, kepala dinas pariwisata, kepala dinas sosial, pemerintahan desa dan P3A banggai laut, kepala dinas perikanan banggai laut, kepala dinas lingkungan hidup dan pertanahan banggai laut, satuan polisi air polda sulawesi tengah, PSDKP provinsi sulawesi tengah dan kepala desa bone bone. Penetapan DPL berbasis masyarakat di desa bone bone mendapat

dukungan dari organisasi perangkat daerah dan disetujui untuk direplikasi ke desa dungkean dan desa-desa lain di wilayah pesisir kabupaten banggai laut.

3.4.1.2. Sosialisasi program di desa dungkean

Sosialisasi dilaksanakan di balai pertemuan umum desa dungkean dengan jumlah peserta 25 orang warga terdiri dari 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hasilnya warga mendapat gambaran tentang pelaksanaan DPL dan Diterimanya Program DPL di desa dungkean, serta mendapat pemahaman pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut.



3.4.1.3. Baseline dan endline KAP survey



Terbentuknya tim survey dari perwakilan masyarakat dan mendapatkan informasi awal terkait tingkat kesadaran terhadap perlindungan ekosistem pesisir, Dalam rangka penyadartahuan masyarakat pesisir terhadap pentingnya lingkungan ekosistem laut, maka kiranya diharapkan adanya pembinaan yang intens dan

mengikutsertakan masyarakat dalam pelestarian serta penjagaan ekosistem bersama-sama OPD terkait. Adanya pembinaan dan pelatihan pengolahan kelompok yang termanajemen, mandiri dan berkelanjutan.

3.4.1.4. Serial kampanye penyadartahuan Media yang digunakan adalah pemutaran film dokumenter yang bertema program/ kegiatan konservasi pesisir dan laut yang berhasil di daerah lain. Film yang ditayangkan menjadi alat yang cukup kuat memicu diskusi dan saling berbagi pengalaman warga mendorong inisiatif perumusan dan penetapan rencana DPL di desa. Selain film, SIKAP Institute juga memperkenalkan jenis dan ancaman terhadap ekosistem yang dilindungi melalui media leaflet. Pesan dalam leaflet menampilkan bagaimana menjaga kelestarian alam khususnya jenis yang terancam punah.



Melalui film, salah satu tokoh masyarakat yang, harsono muda (45) mampu bertindak sebagai motivator bagi warga dengan semangat dan kepedulian dia terhadap manfaat DPL bagi warga pesisir. Dari harsono muda, upaya melindungi kawasan laut dari pelaku-pelaku destruktif dan manfaat untuk generasi penerus membuat sejumlah warga termotivasi untuk terlibat dalam proses penetapan DPL dan mendukung program yang akan dilaksanakan di desa.

Hasil dari kegiatan kampanye penyadartahuan ini diantaranya (1) masyarakat mampu memetakan kecenderungan perubahan jumlah tangkapan dan penyebab menurunnya jumlah tangkapan akibat

ketidak seimbangan ekosistem pesisir di desa dungkean. (2) masyarakat mengetahui jenis-jenis prioritas yang dilindungi

3.4.1.5. Pelatihan survey ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun dan mangrove)

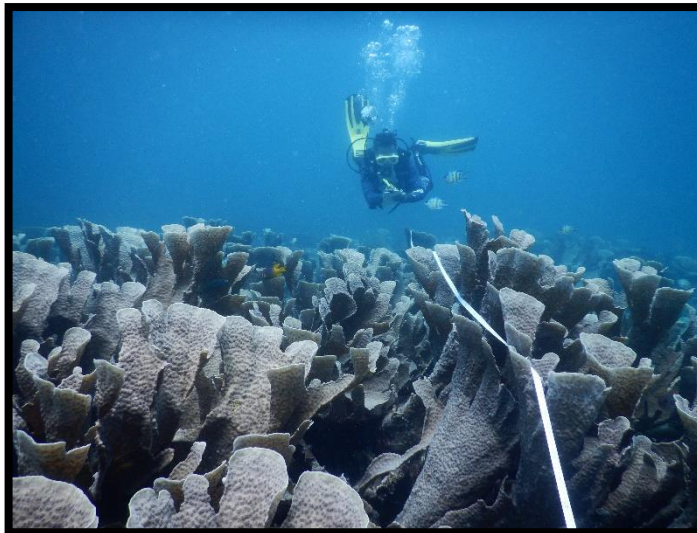
Pengenalan tentang jenis prioritas dan ancaman terhadap kawasan pesisir menjadikan warga untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem pesisir.



3.4.1.6. Survey partisipatif ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun dan mangrove)
 Survey terumbu karang di perairan desa dungken di lakukan dengan metode

Line Intercept transect (LIT).

kedalaman berkisar 3-7 meter. Kondisi persentasi penutupan karang hidup baik acropora maupun Non acropora di stasiun 1 dan stasiun 2 mencapai 54,15% sampai 71,02%, sementara untuk karang mati mencapai 5,11% sampai 22,19%.



tingginya kematian terumbu karang disebabkan kegiatan masyarakat desa tetangga yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Kategori othere 0,24%-4,45%, sedangkan algae 1,20%-2,20% dan Abiotik 17,10%.

Ada 34 jenis dari 20 famili ikan karang yang ditemukan dalam kegiatan survey ini. Salah satu dari 20 famili yang di temukan adalah ikan endemic banggai yang termasuk dalam family *Apogonidae*

3.4.1.7. Workshop hasil survey partisipatif ekosistem pesisir dan perumusan draft DPL

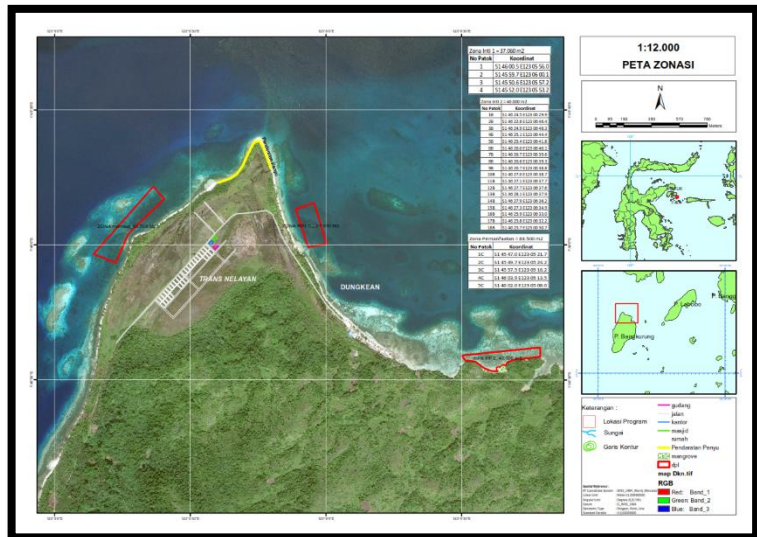
Berdasarkan data hasil survey karang lamun dan mangrove, bahwa tingkat kerusakan karang sudah mulai berkurang, karang yang mati akibat pembusuan. Hingga lahir keputusan untuk menetapkan zona



perlindungan di wilayah desa dungkean. Usulan zonasi pengembangan wisata dari pemerintah dan masyarakat yang bersinergi dengan visi kabupaten banggai laut.

3.4.1.8. Workshop penyepakatan wilayah DPL dan rencana kelola

Usulan masyarakat tentang adanya daerah perlindungan sangat dianggap penting untuk menangkal adanya aktivitas destruktif yang dilakukan pada malam hari oleh pelaku/oknum dari dalam maupun luar kabupaten banggai laut.



Zona yang disepakati dan di tetapkan oleh masyarakat yakni zona inti 1 dengan luasan 37.060 m², zona inti 2 luas 40.000 m², dan zona manfaat (wisata) dengan luas 63.500 m²

3.4.1.9. Pembentukan kelompok DPL dungkean

Untuk mempertahankan kondisi wilayah desa dungkean dari aktivitas destruktif dari dalam maupun luar kabupaten banggai laut, maka di anggap perlu membentuk kelompok pengawasan dan pengelola daerah perlindungan laut,



kelompok DPL dianggap sangat penting dalam hal melakukan pengawasan ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati di desa dungkean. Anggota kelompok di usung dan di pilih dari perwakilan kelompok nelayan.

3.4.1.10. Penyusunan AD ART kelompok DPL dungkean

Kegiatan ini bertujuan sebagai dasar pengambilan sumber peraturan /hukum dalam konteks kelembagaan kelompok Daerah Perlindungan Laut dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat sebagai upaya menciptakan demokratisasi di desa dalam pengambilan keputusan untuk ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama.





3.4.2. Output : Peningkatan kapasitas pengurus DPL dan rencana kelola DPL terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Desa dan RZWP3K

Indikator :

- Pengurus DPL yang terbentuk di 2 (dua) desa mengalami peningkatan kapasitas dalam pengelolaan rencana kelola DPL di tingkat desa melalui RPJMDes/RKPdes/Perdes.
- Rencana kelola DPL terintegrasi dengan rencana kawasan konservasi perairan
- Rencana kelola DPL di dua desa bersinergi dengan program / kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait.

Keberhasilan pada aktivitas ini tercapainya peningkatan kelompok yang terintegrasi dengan rencana pembangunan desa melalui RPJMDes/RPKDes

3.4.2.1. Review RPJMDes



Review RPJMDes Bone-bone

Musyawarah desa dalam rangka menyampaikan RPJMDes tahun 2020 di desa bone-bone di pimpin oleh Camat Bangkurung. Dalam musyawarah ini kelompok DPL telah terintegrasi ke RPJMDes pada kegiatan prioritas bantuan modal usaha di sektor ekonomi.

Sementara di desa dungkean musyawarah desa dipimpin oleh sekretaris camat dan kelompok DPL terintegrasi dengan RPJMDes melalui bantuan modal usaha di sektor ekonomi dan sosial budaya.



Review RPJMDes Dungkean

3.4.3. Output : terbangun sinergi parapihak dalam upaya perlindungan jenis laut dan ekosistemnya melalui kelembagaan yang kolaboratif dengan dibentuknya tim WCU.

Indikator :

- Pelembagaan dan penyepakatan skema pengawasan dan perlindungan jenis di KBA perairan peling banggai melalui pembentukan tim wild crime unit (WCU) yang terdiri dari unsur terkait.
- Protap dan SOP tersusun dalam implementasi program kegiatan wCU yang terbentuk

3.4.3.1. Workshop identifikasi perlindungan jenis terancam punah/dilindungi di KBA peleng banggai yang dilaksanakan di kabupaten.

Kegiatan ini di hadiri oleh bagian hukum setda kabupaten banggai laut, Pol air polda sulteng, dinas perikanan, dinas lingkungan hidup dan pertanahan , dinas pariwisata dan kebudayaan, kepala desa bone-bone, polsek banggai dan koramil 1308-08/banggai.

dalam pelaksanaan kegiatan semua OPD terkait belum ada basis data yang mendukung tentang informasi jumlah kerusakan maupun jumlah terkini dari magrove dan karang, dikarenakan belum adanya data base tentang jenis yang dilindungi.

Usulan lokasi perlindungan BCF (banggai cardinal fish) oleh dinas perikanan banggai laut antara lain : tolobundu, tolisetubono, bakakan, popisi yang masuk di dalam draft pada Kepmen KP no 49 tahun 2018 tentang penetapan status perlindungan terbatas.

Berita acara kesepakatan akan dibentuknya tim terpadu

1. Rekomendasi :

- Di rekomendasikan ke DRPD Kabupaten Banggai Laut untuk membuat Regulasi tentang Bidang Kelautan sebagai jaminan yang akan memberikan kepastian hukum dan akan menjadi-jadi rambu-rambu dalam pengelolaan sumberdaya kelautan didukung dengan penegakkan hukum (peran *Yudikatif*) yang konsisten di Kabupaten Banggai Laut.
- Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Banggai Laut.
- Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam membangun kesadaran moral dan kearifan lokal masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Banggai Laut.
- Dukungan Legislatif terhadap Eksekutif dalam menyusun kebijakan termasuk rencana anggaran pembangunan yang terkait dengan bidang pengawasan kawasan pesisir dan sekitarnya, sangat penting untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Banggai Laut.
- Mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah dan Institusi terkait, dalam melakukan tindakan Prefentif dan Represif untuk menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di Kabupaten Banggai Laut.
- Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut agar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut serta masyarakat pesisir lainnya di Kabupaten Banggai Laut.
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi dan pariwisata bahari.
- Mengajak kepada masyarakat Kabupaten Banggai Laut untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan destruktif fishing.

Menimbang saran dan masukan dari peserta workshop untuk melakukan pertemuan kembali dengan mengundang masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan dan para pemangku kebijakan (Bupati dan DPRD), tanpa adanya pemangku kebijakan se akan-akan agar pertemuan selanjutnya mempunyai kekuatan dalam penentuan kebijakan daerah tentang pengawasan.

3.4.3.2. Pembentukan tim WCU dan Penyusunan protap

Penjelasan terkait kegiatan Whorkshop WCU dan SOP yang melibatkan PEMDA Kab Banggai Laut, Adalah Sbb :

1. Whorskhop WCU dan SOP, dilaksanakan Bersama pemangku kebijakan (Bupati / Wakil Bupati), OPD Terkait, Pemdes, Kelompok DPL Dan Penegak Hukum (Pabung, Kapolsek dan Polairud).
2. Pemda dan pihak penegak hukum disibukan dengan agenda masing-masing.
3. Dengan Waktu Sembilan (9) Bulan, merupakan waktu yang sempit untuk Menyelesaikan keberhasilan Proyek. Namun disisi Lain Sikap Institute Telah berusaha semaksimal mungkin dan tidak meninggalkan nilai-nilai Tangung jawab akan keberhasilan proyek.
4. Waktu pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan target, tapi Sikap institute mengutamakan keberhasilan proyek, dimana pembentukan WCU dan SOP nya yang menjadi kesimpulan akhir peojek harus terlaksana dengan baik dan dapat berfungsi sebagaimana harapan masyarakat diwilayah lokus program.
5. Pembentuk WCU dan SOP yang menjadi harapan masyarakat dan pemdes di wilayah lokus program, ini merupakan tanggung jawab moril kami sebagai pendamping.
6. Untuk itu Sikap Institut Tetap akan melaksanakan koordinasi sampai whorkshop WCU dan SOP dapat terlaksana.
7. Penyelesaian semua program diwilayah proyek dipastikan akan terselesaikan di bulan November 2019.

Demikian penjelasan kami, terkait Keterlambatan pelaksanaan whorkshop WCU dan SOP di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Semoga penjelasan kondisi ini, dapat diberikan kebijakan dan pengertian, Guna Keberhasilan proyek di wilayah program.

4. PEMBELAJARAN

- 4.4. Metode Survey Ekologi yang dilakukan secara partisipatif di desa Dungkean. Dengan melibatkan warga dalam melakukan survey, proses transformasi pengetahuan dan keahlian terjadi. Warga mendapatkan pengetahuan tentang ekosistem pesisir dan mendapatkan pengalaman langsung tata cara dan metode pengukuran kondisi terkini ekosistem pesisir. Dari pengalaman survey yang dilakukan warga dengan pendampingan SIKAP Institute, warga menjadi tahu tehnik survey, penggunaan alat ukur dan mampu menjelaskan hasil survey yang mereka lakukan.

- 4.5. Hasil terkini kondisi ekosistem pesisir yang mengalami laju pertumbuhan pasca *destructive fishing* dan *overfishing* di pesisir dan perairan laut desa Dungkean dinilai mampu menyajikan data dan kecendrungan laju perubahan pertumbuhan karang. Olehnya, data ini mampu menyadarkan warga bahwa pertumbuhan karang di pesisir telah terjadi dan perlu tindakan untuk mengawasi kondisi karang yang berangsur-angsur mulai tumbuh. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengawasi dan menjaga ekosistem di pesisir dan laut melalui kesepakatan pembentukan kelompok DPL.
- 4.6. Kegiatan dan strategi yang berhasil adalah kampanye perlindungan jenis terancam punah secara global. Penyampaian pesan lewat leaflet yang menyajikan jenis hiu, penyu dan pari manta yang mengalami kondisi keterancaman hanya mampu menghasilkan proses pengenalan jenis jenis penting namun belum mampu berkontribusi dalam mengurangi praktek penangkapan jenis yang dimaksud. Aspek penegakan hukum menjadi salahsatu kebutuhan dalam mengatasi ini. Kampanye perlindungan jenis dinilai maksimal dan memberikan hasil pengurangan praktek penangkapan jenis dilindungi. Dalam hal ini, sejumlah warga telah melepasliarkan jenis dilindungi (penyu) dan menghalau pelaku-pelaku tindakan destruktif fishing di wilayah desa dungkean dan bone-bone.

5. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
Penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang	(perburuan, perdagangan, DII)	Jumlah Ancaman turun dengan prosentasi tertentu di akhir program	(survei/Monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan Pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang mendapatkan peningkatan Pengelolaan	Dokumen verifikasi
Peleng banggai	Zona DPL	Zona Inti 1 : 37.060 m2 Zona inti 2 : 40.000 m2 Zona pemanfaatan : 63.500 m2	Peta zonasi dpl

3. Perlindungan Kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi

4. Penerima manfaat

a. Karakter penerima manfaat (silahkan checklist pada tiap kolom yang relevan)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas										
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
								50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Komunitas Masyarakat	√	√								√	
Komunitas Masyarakat	√	√					√				

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (laki-laki)	Jumlah Penerima Manfaat (perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses layanan publik (kesehatan, pendidikan dll)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal	204	187
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
▪		
▪		

▪ dst		
Total Penerima manfaat	204	187

2. Regulasi/Kebijakan Lokal

Nama Regulasi/kebijakan	Ruang Lingkup(nasional, lokal,desa)	Topik	Hasil yang diharapkan
Perda 10 tahun 2017 rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) provinsi sulawesi tengah	Lokal (provinsi)	Pengelolaan ruang laut	
Perda No 1 th 2019	Lokal (kabupaten)	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Perda no 4 tahun 2019	Lokal (kabupaten)	Pengelolaan persampahan	

3. Jaringan Kerja/Forum Multipihak

Jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari proyek yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian proyek contoh: Forum pengelolaan daerah tangkapan air yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air)

Nama Jaringan/kemitraan	Ruang Lingkup(nasional,lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

4. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam produktif yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Zona bentang alam produktif	Daerah Perlindungan Laut	37.060 m2	Peta zonasi, berita acara penetapan
Zona bentang alam produktif	Daerah Perlindungan laut	40.000 m2	Peta zonasi, berita acara penetapan
Zona bentang alam produktif	Daerah Pemanfaatan laut	63.500 m2	Peta zonasi, berita acara penetapan

6. STATUS KEUANGAN

6.4. Pemasukan	: Rp. 127,902,000,-
6.5. Pengeluaran	: Rp. 304,731,000,-
6.6. Saldo	: Rp. -176,729,000,-